



AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Tim Penulis:

Hartoto, Dani Sugiri, Rita Meutia, Sriyani, Riswan Ludfi,
Johanna M. Luhukay, Agustina Mulyani, Wia Rizqi Amalia, Hans Victor Sitepu,
Ribka Shintia Febriarti Bonara, Mela Nurdialy, Darmawanta Sembiring,
Darwanis, Mesak Yandri Masela, Novi Rosyanti, Mohamad Djasuli.



AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Tim Penulis:

Hartoto, Dani Sugiri, Rita Meutia, Sriyani, Riswan Ludfi,
Johanna M. Luhukay, Agustina Mulyani, Wia Rizqi Amalia, Hans Victor Sitepu,
Ribka Shintia Febriarti Bonara, Mela Nurdialy, Darmawanta Sembiring,
Darwanis, Mesak Yandri Masela, Novi Rosyanti, Mohamad Djasuli.



AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Tim Penulis:

**Hartoto, Dani Sugiri, Rita Meutia, Sriyani, Riswan Ludfi,
Johanna M. Luhukay, Agustina Mulyani, Wia Rizqi Amalia, Hans Victor Sitepu,
Ribka Shintia Febriarti Bonara, Mela Nurdialy, Darmawanta Sembiring, Darwanis,
Mesak Yandri Masela, Novi Rosyanti, Mohamad Djasuli.**

Desain Cover:

Septian Maulana

Sumber Ilustrasi:

www.freepik.com

Tata Letak:

Handarini Rohana

Editor:

Hartoto

ISBN:

978-623-459-789-9

Cetakan Pertama:

November, 2023

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA MEDIA UTAMA

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: @penerbitwidina

Telepon (022) 87355370

Kata Pengantar

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami ucapkan selain mengucap rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, buku yang Akuntansi Pemerintahan telah selesai di susun dan berhasil diterbitkan, semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan penambah wawasan bagi siapa saja yang memiliki minat terhadap pembahasan Akuntansi Pemerintahan.

Buku ini merupakan salah satu wujud perhatian penulis terhadap AKUNTANSI PEMERINTAHAN Sebagaimana sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara terutama Pasal 32, dimana laporan realisasi anggaran pemerintah, baik melalui sumber pembiayaan APBN maupun APBD disusun dan disajikan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Akuntansi pemerintahan merupakan suatu proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, peringkasan, penganalisaan, dan pelaporan transaksi keuangan dari suatu entitas untuk menyediakan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan bagi entitas yang dikelola dan dibiayai seluruhnya dari pembiayaan anggaran negara baik melalui APBN maupun APBD.

Dalam sistem global, basis akuntansi merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang telah disepakati dan diterapkan sehingga sangat menentukan atas kapan transaksi atau kejadian berpengaruh dan harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Basis akuntansi terutama terkait dengan pencatatan pendapatan dan biaya ada yang berbasis kas (cash basis) dan basis akrual (accrual basis). Laporan keuangan pemerintah minimal yang harus disajikan adalah: (a). Laporan posisi keuangan akhir periode, (b). Laporan perubahan ekuitas, (c). Laporan arus kas; dan (d). Catatan atas laporan keuangan. Sedangkan laporan keuangan yang disajikan secara lengkap meliputi: (1). Laporan posisi keuangan akhir periode; (2). Laporan laba-rugi; (3). Laporan perubahan ekuitas; (4). Laporan arus kas; (5). Catatan atas laporan keuangan; (6). Informasi kooperatif mengenai periode terdekat; dan (7). Laporan posisi keuangan awal periode.

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah menyebutkan “tiada gading yang tidak retak” dan sejatinya kesempurnaan hanyalah milik Tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang.

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia.

November, 2023

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Pendahuluan	2
B. Laporan Keuangan Pemerintah	3
C. Akuntansi Pemerintahan	4
D. Rangkuman Materi	11
BAB 2 PERKEMBANGAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK	17
A. Pendahuluan.....	18
B. Fase I – Masa 1945 – 2002: Sebelum Era UU Keuangan Negara.....	19
C. Fase II – Masa Tahun 2003-2004: Lahirnya Standar Akuntansi Pemerintahan Pertama	23
D. Fase III - Masa Tahun 2005-2014: Persiapan Menuju Akrual Penuh	24
E. Fase IV – Masa Tahun 2015 – Sekarang: Masa Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Penuh	26
F. Rangkuman Materi	27
BAB 3 STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS KAS DAN BASIS AKRUAL	33
A. Pendahuluan.....	34
B. Basis Dan Sistem Pencatatan Akuntansi Keuangan Sektor Publik	35
C. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	38
D. Siklus Akuntansi Keuangan Daerah	43
E. Persamaan Akuntansi	47
F. Rangkuman Materi	52
BAB 4 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH	55
A. Pendahuluan.....	56
B. Kebijakan Penyajian Laporan Keuangan.....	57
C. Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.....	60
D. Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	67

E. Rangkuman Materi	75
BAB 5 LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM (BLU)	79
A. Pendahuluan	80
B. Jenis Laporan BLU dan Mekanisme Pelaporan	82
C. Klasifikasi Akun Standar BLU/BLUD	83
D. Laporan Operasional	84
E. Neraca	87
F. Laporan Arus Kas	91
G. Catatan Atas Laporan Keuangan	92
H. Rangkuman Materi	96
BAB 6 LAPORAN REALISASI ANGGARAN	99
A. Pendahuluan	100
B. Pengertian Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	101
C. Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	103
D. Format Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	112
E. Rangkuman Materi	118
BAB 7 LAPORAN ARUS KAS	121
A. Pendahuluan	122
B. Pengertian Kas	123
C. Pengertian Laporan Arus Kas	125
D. Manfaat Laporan Arus Kas	126
E. Tujuan Laporan Arus Kas	127
F. Penggolongan Kas Dalam Laporan Arus Kas	128
G. Langkah-Langkah Penyusunan Laporan Arus Kas	132
H. Rangkuman Materi	141
BAB 8 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	147
A. Pendahuluan	148
B. Definisi Catatan Atas Laporan Keuangan	148
C. Struktur dan Isi Catatan Atas Laporan Keuangan	150
D. Penyajian Informasi Umum Tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi	151
E. Penyajian Informasi Tentang Kebijakan Fiskal/Keuangan dan Ekonomi Makro	151
F. Penyajian Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan Selama	

Tahun Pelaporan Berikut Kendala dan Hambatan Yang Dihadapi Dalam Pencapaian Target	152
G. Asumsi Dasar Akuntansi	153
H. Pengguna Laporan Keuangan	154
I. Kebijakan Akuntansi	155
J. Penyajian Rincian dan Penjelasan Masing-Masing Pos Yang Disajikan Pada Lembar Muka Laporan Keuangan.....	158
K. Pengungkapan Informasi Yang Diharuskan Oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Yang Belum Disajikan Dalam Lembar Muka Laporan Keuangan	160
L. Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya	161
M. Susunan	161
N. Rangkuman Materi	162
BAB 9 AKUNTANSI PERSEDIAAN	165
A. Pendahuluan.....	166
B. Definisi	168
C. Pengakuan dan Pengukuran Persediaan	171
D. Metode Penilaian Persediaan.....	173
E. Contoh Penerapan.....	174
F. Penyajian dan Pengungkapan.....	180
G. Perlakuan Khusus Atas Persediaan.....	182
H. Rangkuman Materi	183
BAB 10 AKUNTANSI INVESTASI.....	187
A. Pendahuluan.....	188
B. Klasifikasi Investasi	190
C. Pengakuan dan Pengukuran Investasi.....	191
D. Metode Penilaian Investasi	192
E. Perolehan, Hasil Investasi dan Pelepasan Investasi Jangka Pendek	193
F. Perolehan, Hasil Investasi dan Pelepasan Investasi Jangka Panjang	195
G. Penyajian dan Pengungkapan.....	198
H. Rangkuman Materi	202

BAB 11 AKUNTANSI ASET TETAP	205
A. Pendahuluan.....	206
B. Pengakuan dan Kriteria Aset Tetap.....	207
C. Pengukuran Aset Tetap.....	207
D. Penilaian Kembali Aset Tetap (Revaluation).....	217
E. Aset Bersejarah (Heritage Assets).....	218
F. Aset Infrastruktur (Infrastructure Assets).....	218
G. Aset Militer (Military Assets).....	219
H. Penghentian dan Pelepasan (Retirement And Disposal).....	219
I. Penyajian dan Pengungkapan.....	223
J. Rangkuman Materi.....	227
BAB 12 AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	231
A. Pendahuluan.....	232
B. Pengertian, Ruang Lingkup dan Tujuan Sistem Akuntansi Konstruksi	233
C. Konstruksi Dalam Pengerjaan.....	239
D. Kontrak Konstruksi	240
E. Penyatuan dan Segmentasi Kontrak Konstruksi.....	240
F. Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan.....	241
G. Pengukuran.....	241
H. Pengungkapan	244
I. Rangkuman Materi	244
BAB 13 AKUNTANSI KEWAJIBAN	247
A. Pendahuluan.....	248
B. Klasifikasi Kewajiban.....	249
C. Utang Dalam Negeri Jangka Pendek.....	251
D. Utang Dalam Negeri Jangka Panjang	257
E. Utang Luar Negeri Jangka Pendek	261
F. Utang Luar Negeri Jangka Panjang	263
G. Sistem Akuntansi Kewajiban dan Pelaporan Keuangan	264
H. Rangkuman Materi	265
BAB 14 KOREKSI KESALAHAN PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PERUBAHAN LUAR BIASA	26
A. Pendahuluan.....	268

B.	Perubahan Akuntansi	269
C.	Pengungkapan Proforma Setelah Penggabungan Usaha	280
D.	Koreksi Kesalahan	280
E.	Pengungkapan Yang Diwajibkan Untuk Koreksi Periode Sebelumnya	282
F.	Ikhtisar Perubahan Akuntansi dan Koreksi Kesalahan	283
G.	Rangkuman Materi	284
BAB 15	LAPORAN OPERASIONAL	289
A.	Pendahuluan	290
B.	Laporan Operasional	291
C.	Akuntansi Pendapatan—Lo	292
D.	Akuntansi Beban	301
E.	Pos Luar Biasa	307
F.	Rangkuman Materi	308
BAB 16	METODOLOGI PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	311
A.	Pendahuluan	312
B.	Pengertian Keuangan Daerah	313
C.	Pengertian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	314
D.	Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	316
E.	Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	321
F.	Aspek-Aspek Pengukuran Kinerja	323
G.	Tujuan Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah	323
H.	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah	325
I.	Analisis Rasio Keuangan	326
J.	Langkah-Langkah Menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	329
K.	Jenis-Jenis Analisis Rasio Keuangan	330
L.	Analisis Kinerja Keuangan Belanja Daerah	332
M.	Rangkuman Materi	334
	GLOSARIUM	338
	PROFIL PENULIS	350



AKUNTANSI PEMERINTAHAN

BAB 1: PENDAHULUAN

Ir. Hartoto, M.Si

STAI Miftahul Ulum Tanjungpinang

BAB 1

PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Sebagaimana sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara terutama Pasal 32, dimana laporan realisasi anggaran pemerintah, baik melalui sumber pembiayaan APBN maupun APBD disusun dan disajikan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 71 Tahun 2010 tentang SAP. SAP menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP merupakan penyajian fungsi akuntansi secara sistematis dan terstruktur terstruktur sesuai dengan prosedur, penyelenggaraan, peralatan, dan elemen lain di entitas pemerintahan.

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 01 tahun 2014, laporan keuangan disajikan secara terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan dimaksudkan agar informasi posisi keuangan, arus kas, dan kinerja keuangan entitas yang dapat dimanfaatkan pengguna laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen terhadap penggunaan sumber daya (dana) yang dipercayakan kepada manajemen.

Penyusunan laporan keuangan pemerintahan minimal yang harus disajikan adalah: (a). Laporan posisi keuangan akhir periode; (b). Laporan laba-rugi; (c). Laporan perubahan ekuitas; (d). Laporan arus kas; dan (e). Catatan atas laporan keuangan. Sedangkan laporan keuangan yang disajikan secara lengkap meliputi: (1). Laporan posisi keuangan akhir

DAFTAR PUSTAKA

- Andrey Hasiholan Pulungan, Ahmad Basid Hasibuan, dan Luciana Haryono. 2013. Akuntansi Keuangan Dasar, Berbasis PSAK Per Juni 2012. Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Bahrullah Akbar. 2013. Akuntansi Pemerintahan. PT. Bumi Metro Raya, Jakarta.
- Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti. 2014. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Hadri Mulya. 2013. Memahami Akuntansi Dasar, Pendekatan teknis Siklus Akuntansi. Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Hartoto, 2021. Akuntansi Syariah, Sebuah Tinjauan Teori dan Praktis. Penerbit Widina. Bandung.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2005. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Pernyataan No 02 Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2005. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Pernyataan No 01 Penyajian Laporan Keuangan. Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2005. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Pernyataan No 03 Laporan Arus Kas. Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2005. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Pernyataan No 04 Catatan Atas Laporan Keuangan. Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2005. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Pernyataan No 05 Akuntansi Persediaan. Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2005. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Pernyataan No 06 Akuntansi Investasi. Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2005. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Pernyataan No 07 Akuntansi Aset Tetap. Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta.

- Ikatan Akuntan Indonesia. 2005. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Pernyataan No 08 Akuntansi Konstruksi Dalam Pengejaan. Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2005. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Pernyataan No 09 Akuntansi Kewajiban. Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2005. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Pernyataan No 10 Kesalahan Perubahan Kebijakan Akuntansi dan perubahan Luar Biasa. Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2005. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Pernyataan No 11 Laporan Keuangan Konsolidasian. Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2005. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Pernyataan No 12 Laporan Operasional. Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2005. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Pernyataan No 13 Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU). Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2005. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Pernyataan No 14 Akuntansi Aset Takberwujud. Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2014. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 01 Penyajian Laporan Keuangan. Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2014. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 03 Laporan Keuangan Interim. Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2014. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 04 Aset Tetap. Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2014. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 05 Laporan Keuangan Tersendiri. Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2014. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 16 Aset Tetap. Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta.

- Ikatan Akuntan Indonesia. 2014. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 19 Aset Takberwujud. Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta.
- Muindro Renyowijoyo. 2008. Akuntansi Sektor Publik, Organisasi Nonlaba. Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Nanu Hasanuh. 2011. Akuntansi Dasar, Teori dan Praktek. Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Tulis S. Meliala, Niko Silitonga dan Timbul Sinaga. 2007. Akuntansi Sektor Publik .Penerbit Semesta Media, Jakarta.
- Sujarweni, J. Wiratna, 2022. Akuntansi Sektor Publik, Teori, Konsep, dan Aplikasi .Penerbit Baru Press, Yogyakarta.
- https://akuntansikeuangan.com/cash-basis-vs-accrual-basis_2021, jam: 08.32.
- <http://www.integrasi-edukasi.org/sistem-informasi-akuntansi-berbasis-kas-vs-basis-akrual>
- <https://ekonomi.bunghatta.ac.id/index.php/id/artikel/789-memahami-cash-basis-vs-accrual-basis>
- <https://www.finansialku.com/definisi-akrual/>



AKUNTANSI PEMERINTAHAN

BAB 2: PERKEMBANGAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Dani Sugiri, S.E., S.S.T., M.Ak

Politeknik Keuangan Negara STAN

BAB 2

PERKEMBANGAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

A. PENDAHULUAN

Akuntansi menjadi salah satu alat bantu pengambilan keputusan baik di perusahaan swasta, organisasi non perusahaan, dan juga lembaga pemerintah (Putri, 2010). Akuntansi pemerintah di Indonesia berkembang secara dinamis seiring dengan reformasi pengelolaan keuangan negara. Hal ini dapat kita pahami bahwa akuntansi dipergunakan dalam salah satu tahapan dalam siklus manajemen keuangan negara, yaitu pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Sejak Indonesia merdeka di tahun 1945, telah banyak dinamika yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk dalam implementasi akuntansi keuangan negara. Indonesia telah mengalami banyak pengalaman dengan pengembangan dan implementasi akuntansi pemerintah (Handoko, 2021). Praktik akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia didorong oleh adanya desakan transparan informasi, kemajuan teknologi, serta perekonomian global (Meilistya et al., 2018). Selain itu, penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum juga menjadi salah satu upaya pemenuhan prinsip *good governance* yaitu akuntabilitas dan transparansi (Nainggolan, 2020).

Bab 2 ini akan membahas mengenai perkembangan akuntansi pemerintahan di Indonesia sejak jaman kemerdekaan hingga saat ini. Pembagian tahapan dilakukan dengan mempertimbangkan adanya perubahan yang signifikan dalam akuntansi pemerintahan. Perkembangan

DAFTAR PUSTAKA

- Anjilni, R. Q., Handayani, A., & Pratiwi, A. P. (2022). *Akuntansi sektor publik* (Afridayani (ed.); Perdana, Issue 1). UNPAM PRESS.
- Aryani, F. (2014). *Sistem Akuntansi Berbasis AkruaI - SAIBA*. <https://fafaahmad.wordpress.com/2014/07/16/sistem-akuntansi-instansi-berbasis-akruaI-saiba/>
- Bagian Keuangan Kemenko Perekonomian RI. (2019). *Sejarah akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah Indonesia dari masa ke masa*. MONEVKEU. <https://monevkeu.ekon.go.id/2019/03/01/sejarah-akuntansi-dan-pelaporan-keuangan-pemerintah-indonesia-dari-masa-ke-masa/>
- Handoko, B. L. (2021). *Selayang pandang perkembangan akuntansi pemerintahan di Indonesia*. Universitas BINUS. <https://accounting.binus.ac.id/2021/11/19/selayang-pandang-perkembangan-akuntansi-pemerintahan-di-indonesia/>
- Hariyanto, A. (2012). Penggunaan basis akrual dalam akuntansi pemerintah di Indonesia. *Dharma Ekonomi*, 19(36), 11.
- Kementerian Keuangan RI. (2003). *Keputusan Menteri Keuangan Nomor 337/KMK.012/2003 tentang Sistem Akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat*. Kementerian Keuangan RI.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). (2021). *Perkembangan standar akuntansi pemerintahan dan peluang riset*. KSAP.
- KPPN Kuala Tungkal. (n.d.). *Aplikasi SAKTI*. TITIAN. Retrieved June 11, 2023, from <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/kualatungkal/id/titian/sakti.html>
- Kusuma, R. S. (2013). *Analisis kesiapan pemerintah dalam menerapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual (studi kasus pada pemerintah kabupaten Jember)*.
- Meilistya, M., Saleh, F. T., Supriyanto, J., Meta, M. C. R., Utomo, R. H., Najati, I., Assyayuti, A. N., Ahyani, W., Wulandari, R., Purwidyasari, A., Muzakki, H., Sahara, H., Priyatmo, T., Fauzi, A., Ambarwati, R. D., Handayani, N. D., & Kumaradewi, K. A. (2018). *Akuntansi dan*

pelaporan keuangan pemerintah Indonesia dari masa ke masa (Pertama). Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

- Nainggolan, E. U. (2020). *Sejarah Panjang Laporan Keuangan Pemerintah Indonesia*. Rubrik Artikel. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/13257/Sejarah-Panjang-Laporan-Kuangan-Pemerintah-Indonesia.html>
- Pemerintah Republik Indonesia. (1954). *Undang-Undang Darurat RI Nomor 3 Tahun 1954 tentang Mengubah "Indonesische Comptabiliteitswet" (Staatsblad 1925 Nomor 448) dan "Indonesische Bedrijvenwet" (Staatsblad 1927 No. 419)*. Pemerintah Republik Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/52932/uudrt-no-3-tahun-1954>
- Pemerintah Republik Indonesia. (1968). *Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (STBL. 1925 Nomor 448) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 drt. 1954 (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 6)*. Pemerintah Republik Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/49165/uu-no-9-tahun-1968>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Pemerintah Republik Indonesia.
- Priharjanto, A., & Hadiwibowo, Y. (2021). Reformasi pengelolaan keuangan negara dan peran PKN STAN. *Info Artha*, 5(2), 108–117.
- Priyono, N. (2012). *Perkembangan akuntansi pemerintahan di Indonesia periode sebelum reformasi sampai dengan pasca-reformasi* (p. 13). Universitas Gajah Mada. https://student.uigm.ac.id/assets/file/Materi/PERKEMBANGAN_AKUNTANSI.pdf
- Putri, A. (2010). Perkembangan Akuntansi di Indonesia. *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi Dan Komputerisasi Akuntansi*, 1(2), 38–49.
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*. In *Pemerintah Republik Indonesia*. Republik Indonesia.

- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. In *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022: Vol. Nomor 1* (Issue 2022). DPR RI dan Presiden RI.
- Rizky, H. P., & Setiawan, D. (2019). Perkembangan penelitian akuntansi sektor publik di Indonesia. *Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 8(2), 94–116.
- Rusdi, D., & Suprianto, E. (2022). Bibliografi penelitian akuntansi pemerintahan di Indonesia. *Journal of Accounting Science (JAS)*, 6(1), 38–52.
- Suryanto, S. (2018). Tinjauan Atas Reformasi Akuntansi Pemerintahan Di Indonesia. *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 6(2), 179–197.
- Susilo, G. F. A., & Bharata, R. W. (2020). Urgensi akuntansi penganggaran di pemerintahan Indonesia. *TECHNOBIZ: International Journal of Business*, 3(2), 13–17.
- Yuhertiana, I. (2012). Reformasi Akuntansi Sektor Publik: Mewujudkan Pelayanan Publik yang Lebih Baik Melalui Pelaporan Keuangan Pemerintah yang Akuntabel. *UPN Jatim Repository*, 1–17. <http://eprints.upnjatim.ac.id/2395/>
- Zelmiyanti, R. (2015). Perkembangan akuntansi berbasis akrual pada sektor pemerintah di Indonesia. *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi Dan Komputerisasi Akuntansi*, 6(1), 68–72.



AKUNTANSI PEMERINTAHAN

BAB 3: STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS KAS DAN BASIS AKRUAL

Dr. Rita Meutia, S.E., M.Si., Ak.

Universitas Syiah Kuala

BAB 3

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS KAS DAN BASIS AKRUAL

A. PENDAHULUAN

Standar akuntansi merupakan pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan. Standar akuntansi sangat diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan. Tidak adanya standar akuntansi yang memadai akan menimbulkan implikasi negatif berupa rendahnya reliabilitas dan objektivitas informasi yang disajikan, inkonsistensi dalam pelaporan keuangan serta menyulitkan dalam proses audit

Indonesia untuk pertama kalinya menerbitkan Standar Akuntansi Pemerintahan pada tahun 2005 yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. SAP digunakan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun laporan keuangan. SAP yang diterbitkan tahun 2005 tersebut merupakan standar akuntansi berbasis kas menuju akrual (cash toward accrual) atau dikenal dengan singkatan CTA. Berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP. Berisi kerangka konseptual akuntansi pemerintah dan 11 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP). CTA merupakan basis yang unik yang dibentuk dan dikembangkan sesuai dengan kondisi di Indonesia. CTA tidak dikenal di negara lain dan merupakan basis transisi

DAFTAR PUSTAKA

- Dirjen Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri (2014).Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akruaal
- Dirjen Perimbangan keuangan Kementrian Keuang Republi Indonesia (2014). Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah dan SKPD, Erlina,dkk (2015). Akuntansi Keuangan Daerah Bebasis Akruaal , Salemba Empat, Jakarta.
- Halim,Abdul dan Muhammad Syam Kusufi (2012) .Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah, Salemba Empat. Jakarta.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintah. 2021.Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akruaal. <https://www.ksap.org/sap/wp-content/uploads/2021/07/Buku-SAP-2021-1.pdf>
- Mardiasmo (2018), Akuntansi Sektor Publik, ANDI, Yogyakarta
- Nordiawan, dkk (2007).Akintansi Pemerintahan. Salemba Empat. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia.2010. Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. PP No 71 Tahun 2010
- Pemerintah Republik Indonesia.2013. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Standar Akuntansi Berbasis Akruaal Pada Pemerintah. Permendagri no 64 tahun 2013.
- Siregar,Baldric (2017) , Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Pmerintah Daerah berbasis Akruaal. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.



AKUNTANSI PEMERINTAHAN

BAB 4: PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

Sriyani, S.E., M.Akt

Politeknik Keuangan Negara STAN

BAB 4

PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

A. PENDAHULUAN

Terbitnya paket undang-undang di bidang keuangan negara merupakan tonggak reformasi keuangan negara di Indonesia. Sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sudah menjadi sebuah keharusan.

Salah satu amanat Undang-undang no 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bahwa laporan keuangan pemerintah harus dapat menghasilkan statistik keuangan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan analisis kebijakan fiskal dan analisis perbandingan antar negara (*Cross country studies*).

Pemerintah dituntut untuk mengelola keuangan negara/daerah secara Akuntabel, transparan dan bertanggung jawab. Pertanggungjawaban keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban yang harus disusun oleh pemerintah, untuk menjaga obyektifitas nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan perlu disiapkan standar akuntansi yang digunakan oleh seluruh entitas pelaporan/ entitas akuntansi baik di pusat maupun di daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Keuangan, Menteri. 2022. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 Tahun 2022 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.*
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. 2010. *Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Standar Akuntansi Pemerintahan.*
<https://www.ksap.org/sap/wp-content/uploads/2021/07/Buku-SAP-2021-1.pdf>.
- <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/162792/permendagri-no-77-tahun-2020>



AKUNTANSI PEMERINTAHAN

BAB 5: LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM (BLU)

Riswan Ludfi, S.E., M.M

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Indonesia Banjarmasin

BAB 5

LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM (BLU)

A. PENDAHULUAN

Sekitar 5 tahun pasca reformasi birokrasi pemerintah juga tengah melakukan pembenahan. Sebuah sudut pandang terkait pengelolaan keuangan negara berupa UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004. Hal ini ditetapkan untuk mendukung perbaikan terhadap prinsip-prinsip manajemen keuangan negara yang terdiri:

1. Berorientasi pada hasil
2. Prinsip Profesionalitas pengelolaan
3. Akuntabilitas dan Transparasi.

Terdapat berbagai dasar hukum yang dijadikan landasan baik dalam pembentukan serta pengelolaan operasional Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah seperti:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Pertama Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Fauziah, I. (2018). *SAP Standar Akuntansi Pemerintahan, Sesuai: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010*. Jakarta: Penerbit Ilmu.
- PP No. 23 Tahun 2005
- Restianto, E., Y., & Bawono, I., R. (2015). *Pengelolaan Keuangan BLU/BLUD, Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- UU No. 17 Tahun 2003
- UU No. 1 Tahun 2004
- UU No. 15 Tahun 2014



AKUNTANSI PEMERINTAHAN

BAB 6: LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Johanna M Luhukay, S.P., M.Sc

Universitas Pattimura, Ambon

BAB 6

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

A. PENDAHULUAN

Laporan Realisasi Anggaran merupakan Laporan yang menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan laporan yang menggambarkan selisih antara jumlah anggaran awal periode dengan jumlah anggaran akhir periode yang telah direalisasi (Bastian, 2007:308).

Informasi dari Laporan Realisasi Anggaran sendiri berfungsi untuk mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas, dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan; (a) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi, dan (b) Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Di dalam Laporan Realisasi Anggaran yang harus diidentifikasi secara jelas dan diulang pada setiap halaman laporan yang bersikap informasi mengenai: Nama Entitas Pelaporan atau Sarana Identifikasi lainnya, Cakupan Entitas Pelaporan, Periode Yang Dicakup, Mata Uang Pelaporan, dan Satuan Angka yang Digunakan. Laporan Realisasi Anggaran sendiri disajikan minimal sekali dalam setahun. Pos-pos pada Laporan Realisasi Anggaran minimal mencakup; (1) Pendapatan-LRA, (2) Belanja, (3) Transfer, (4) Surplus/defisit-LRA, (5) Penerimaan Pembiayaan, (6)

DAFTAR PUSTAKA

- Andiana Moedasir. (2023) Andiana Laporan Realisasi Anggaran: Unsur, Contoh, dan Cara Membuatnya. <https://majoo.id/solusi/detail/laporan-realisasi-anggaran>
- Bastian, Indra. 2007. Sistem Akuntansi Sektor Publik. Edisi Kedua. Jakarta : Salemba Empat.
- Halkadri Fitra. (2019). Analisis Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah. Diakses https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=zsXODwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT7&dq=info:6-HMMWvov4AJ:scholar.google.com/&ots=QWFQz-4OVe&sig=Bo6t38pnh7pWbkYQmxA2342iW5k&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false



AKUNTANSI PEMERINTAHAN

BAB 7: LAPORAN ARUS KAS

Agustina Mulyani, S.E., M.M

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Dahani Dahanai Buntok

BAB 7

LAPORAN ARUS KAS

A. PENDAHULUAN

Pada awalnya perusahaan membutuhkan laporan keuangan untuk menguji keakuratan keuangan yang masuk serta keluar dari perusahaan, tetapi pada perkembangannya laporan keuangan tidak hanya digunakan sebagai alat buat menguji kebenarannya saja, tetapi juga menjadi dasar penilaian kondisi keuangan perusahaan, yang didasarkan pada laporan keuangan yang sudah dianalisis. Laporan keuangan selanjutnya dipergunakan oleh pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 2015, laporan keuangan artinya bagian yang berasal dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap umumnya mencakup: neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan pada berbagai macam cara, misalnya menjadi laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta dokumen penjelasan yang bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

Secara umum, laporan keuangan ialah catatan mengenai informasi keuangan perusahaan selama satu periode akuntansi yang dapat digunakan buat mendeskripsikan kinerja perusahaan tersebut.

Informasi mengenai posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan dibutuhkan untuk dapat menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas (dan setara kas), dan waktu serta kepastian dari hasil tersebut. Kondisi keuangan suatu perusahaan dapat dipengaruhi oleh potensi sumber daya, posisi keuangan yang sehat, likuiditas, solvabilitas

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Sugiono dkk. 2010. *Akuntansi dan Pelaporan Keuangan*. Jakarta: Grasindo.
- Bambang Riyanto. 2011. *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*. Yogyakarta: BPFE.
- Donald E. Kieso dkk. 2008. *Akuntansi Intermediate*. Jakarta: Erlangga.
- Dyckman dkk. 2000. *Akuntansi Intermediate*. Jakarta: Erlangga.
- Henry Simamora. 2001. *Akuntansi Basis Pengambilan Keputusan Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat
- Hery. 2013. *Auditing (Pemeriksaan Akuntansi I)*. Jakarta: CAPS.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 02*. Jakarta: Salemba Empat.
- Munawir S. 2010. *Analisa Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Liberty.
- Sofyan Syafri Harahap. 2006. *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- <https://www.cermati.com/artikel/arus-kas-pendanaan>
- <https://flip.id/business/blog/mengenal-laporan-arus-kas-dan-cara-menyusunnya>
- <https://accurate.id/akuntansi/pengertian-cashflow/>



AKUNTANSI PEMERINTAHAN

BAB 8: CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Wia Rizqi Amalia, S.E., M.Sc.

Universitas Lambung Mangkurat

BAB 8

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENDAHULUAN

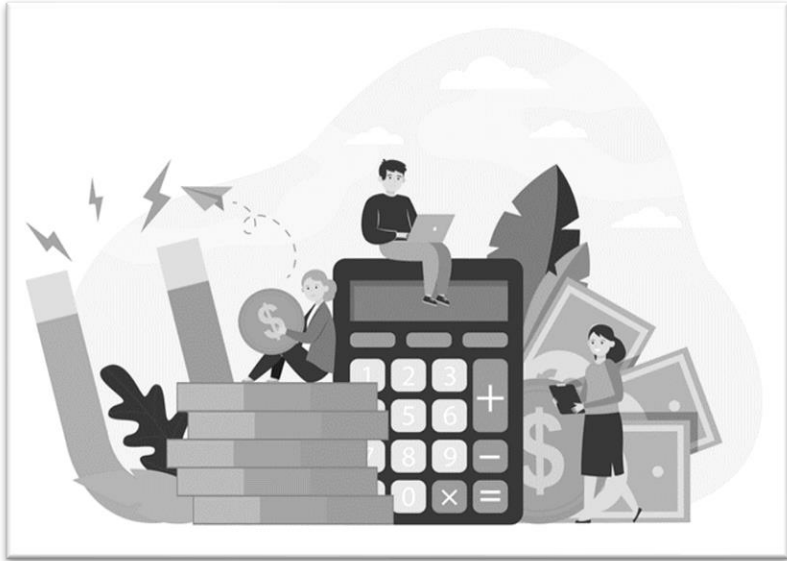
Pemerintah berkewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggung jawaban dalam penggunaan APBN dan APBD. Hal ini diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan, diperlukan adanya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). Sejak diterbitkannya SAP berbasis akrual, pemerintah diharuskan membuat laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran (LRA), laporan perubahan saldo anggaran lebih (LP SAL), neraca, laporan operasional (LO), laporan arus kas (LRA), laporan perubahan ekuitas (LPE), dan catatan atas laporan keuangan (CaLK). Eksistensi catatan atas laporan keuangan diwajibkan dalam SAP, namun kenyataannya keberadaan CaLK hanya sebagai pelengkap atas keenam laporan keuangan lainnya. Kedudukan CaLK sebagai pelengkap komponen laporan keuangan akan dibahas lebih lanjut pada pembahasan berikut.

B. DEFINISI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Pembaca dan pengguna laporan keuangan pemerintah tidak hanya manajer sektor publik saja, namun juga masyarakat luas. Adanya perubahan basis kas menjadi basis akrual dapat menimbulkan kesalahpahaman bagi pembaca dan pengguna laporan keuangan. (Kusufi,

DAFTAR PUSTAKA

- Kusufi, Muhammad Syam; Asrihapsari, A. (2016). Tinjauan atas PSAP yang Terkait dengan Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. In M. S. Halim, Abdul; Kusufi (Ed.), *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan, dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah* (Cetakan Ke, p. 299). Salemba Empat.
- Majid, J. (2019). *Akuntansi Sektor Publik* (1st ed.). CV Berkah Utami.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.



AKUNTANSI PEMERINTAHAN

BAB 9: AKUNTANSI PERSEDIAAN

Hans Victor Sitepu, S.E., M.M., CMA., CACP., CRMP

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi GICI

BAB 9

AKUNTANSI PERSEDIAAN

A. PENDAHULUAN

Barang Persediaan merupakan salah satu aset penting pada setiap organisasi. Investasi dalam persediaan seringkali merupakan aset lancar terbesar dalam berbagai jenis organisasi, termasuk dalam bisnis perdagangan (ritel) dan manufaktur serta organisasi pemerintahan. Oleh karena itu deskripsi dan pengukuran persediaan memerlukan perhatian yang cermat. Tujuan utama dari setiap organisasi dalam mengelola persediannya adalah untuk memastikan kelancaran operasionalnya, baik dalam hal produksi maupun penjualan, sehingga apa yang telah direncanakan dan ditargetkan oleh organisasi tersebut dapat tercapai tanpa kendala yang disebabkan oleh kurangnya suatu barang persediaan tertentu. Hal tersebut berlaku bagi organisasi swasta maupun pemerintahan. Di sektor swasta, Persediaan adalah barang aset yang dimiliki perusahaan untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari, atau barang yang akan digunakan atau dikonsumsi dalam produksi barang yang akan dijual (Weygandt, 2018). Sementara di sektor pemerintahan, aktifitas operasional yang membutuhkan kecukupan Barang Persediaan juga cukup tinggi volume transaksinya, dengan tujuan utama yaitu dalam rangka peningkatan pelayanan public. Tuntutan pertanggungjawaban serta keterbukaan yang harus diterapkan pada instansi pemerintah terkait rincian penggunaan dana masyarakat dalam bentuk Barang Persediaan ini menjadikan akuntansi persediaan ini sangat diperlukan (Nordawati, 2012).

DAFTAR PUSTAKA

- Nordiawan, D., Putra S. I., Rahmawati M. (2012). Akuntansi Pemerintah. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Presiden Republik Indonesia, 22 Oktober 2010 revisi 2016
- Peraturan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 13 tentang Properti Investasi. Dewan Standar Akuntansi, 29 November 2011
- Riyanto, Agus P. (2015). Akuntansi Pemerintah Berbasis Akruwal. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Warren C. S., Reeve J. M., Fess P. E. (2006). Pengantar Akuntansi Edisi 21. Jakarta: Salemba Empat.
- Weygandt J. J., Kimmel P. D., Kieso D. E. (2018). Pengantar Akuntansi 1 Berbasis IFRS Edisi 2e. Jakarta: Salemba Empat.



AKUNTANSI PEMERINTAHAN

BAB 10: AKUNTANSI INVESTASI

Ribka Shintia Febriarti Bonara, S.E., M.Ak

Universitas Pattimura

BAB 10

AKUNTANSI INVESTASI

A. PENDAHULUAN

Dalam dunia bisnis, investasi merupakan sebuah komitmen terhadap sejumlah dana pada sektor riil (tanah, emas, mesin atau bangunan) maupun aset finansial (deposito, saham, obligasi) yang dilakukan saat ini, dengan harapan akan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang (Tandelilin, 2010). Investasi merupakan suatu kegiatan membeli aset di masa sekarang dan menahannya dengan harapan aset tersebut akan menghasilkan pendapatan atau terjadi peningkatan nilai di masa depan. Investasi juga dapat diartikan sebagai pembelian dan penggunaan barang dan jasa saat ini, barang dan jasa tersebut ditangguhkan dan akan digunakan untuk penciptaan kekayaan di masa yang akan datang. Bagi sektor swasta, perusahaan melakukan kegiatan investasi dengan cara membeli utang atau sekuritas saham (seperti deviden, bunga, royalti dan lainnya) dengan mempertimbangkan beberapa alasan antara lain: 1) perusahaan memiliki kelebihan kas, 2) perusahaan berinvestasi untuk menghasilkan laba dari pendapatan investasi, 3) perusahaan berinvestasi untuk alasan strategis (Weygandt, 2018). Sementara bagi sektor publik aktivitas investasi yang dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah dilakukan dengan cara memanfaatkan surplus anggaran serta manajemen kas untuk mendapatkan keuntungan jangka panjang maupun jangka pendek, dengan tujuan utama yaitu dalam rangka peningkatan pelayanan publik (Nordiawan, 2012).

DAFTAR PUSTAKA

- Djanegara, S. (2017). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Teori, Praktik Dan Permasalahan – Google Book. Kesatuan Press. (55). https://books.google.co.id/books?id=hfhmDwAAQBAJ&newbks=0&printsec=frontcover&pg=PA58&dq=investasi+untuk+akuntansi+pemerintahan&hl=ban&source=newbks_fb&redir_esc=y#v=onepage&q=investasi%20untuk%20akuntansi%20pemerintahan&f=false
- Mankiw. (2013). Mankiw Principles of Economics. In Journal of Chemical Information and Modeling. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Nordiawan, D., Putra S. I., Rahmawati M. (2012). Akuntansi Pemerintah. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Presiden Republik Indonesia, 22 Oktober 2010 revisi 2016
- Peraturan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 13 tentang Properti Investasi. Dewan Standar Akuntansi, 29 November 2011
- Riyanto, Agus P. (2015). Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Tandelilin., Eduardus. (2010). Portofolio dan Investasi: Teori dan Aplikasi. Edisi 1. Yogyakarta: Kanisius.
- Sugiyanto, N. (2020). Hari ANALISIS INVESTASI PEMERINTAH PUSAT PADA LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL. |FINANCIAL: Jurnal Akuntansi, Volume 6 – Nomor 2, Desember 2020, (Hlm 178-187)
- Warren C. S., Reeve J. M., Fess P. E. (2006). Pengantar Akuntansi Edisi 21. Jakarta: Salemba Empat.
- Weygandt J. J., Kimmel P. D., Kieso D. E. (2018). Pengantar Akuntansi 1 Berbasis IFRS Edisi 2e. Jakarta: Salemba Empat.



AKUNTANSI PEMERINTAHAN

BAB 11: AKUNTANSI ASET TETAP

Mela Nurdialy, S.E., M.Ak

Sekolah Vokasi IPB

BAB 11

AKUNTANSI ASET TETAP

A. PENDAHULUAN

Semua entitas, termasuk entitas Pemerintah memiliki aset. Aset tetap sering menjadi aset utama Pemerintah yang disajikan pada neraca. Bab ini akan membahas perlakuan akuntansi atas aset tetap di instansi Pemerintah, seperti pengakuan, pengukuran, pencatatan dan penyajian serta pengungkapan aset tetap.

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Jenis aset tetap terdiri atas:

- Tanah
- Peralatan dan Mesin
- Gedung dan Bangunan
- Jalan, Irigasi dan jaringan
- Aset Tetap Lainnya, dan
- Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah, seperti bahan (materials) dan perlengkapan (*supplies*).

DAFTAR PUSTAKA

- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Republik Indonesia. (2020). Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Pernyataan Standar No. 7. Akuntansi Aset Tetap.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.OS/2019 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintahan Pada Pemerintah Pusat
- Suryanovi, Sri. (2014). Buku Seri Akuntansi Pemerintah. Akuntansi Pemerintah Pusat (Buku 2). Tangerang Selatan: PKN Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.
- Tim Dosen Akuntansi Pemerintah II Prodi DIII Akuntansi. (2021). Modul Akuntansi Aset Tetap dan Konstruksi Dalam Pengerjaan. Tangerang Selatan: PKN Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.



AKUNTANSI PEMERINTAHAN

BAB 12: AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

BAB 12

AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

A. PENDAHULUAN

Industri konstruksi merupakan sektor ekonomi yang memiliki dampak besar terhadap perkembangan ekonomi suatu negara. Seiring dengan pertumbuhan industri ini, semakin banyak proyek konstruksi yang dilakukan, mulai dari pembangunan gedung, infrastruktur, hingga fasilitas publik. Namun, pengelolaan proyek konstruksi tidaklah mudah. Proyek-proyek ini sering melibatkan berbagai biaya, tenaga kerja, sumber daya, dan risiko yang harus dikelola dengan hati-hati. Akuntansi konstruksi adalah alat penting yang digunakan untuk memastikan transparansi dan pengelolaan keuangan yang efisien dalam proyek konstruksi. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang akuntansi konstruksi dalam pengerjaan proyek sangatlah penting.

Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang akuntansi konstruksi dalam pengerjaan proyek konstruksi. Ini termasuk konsep dasar, penggunaan sistem akuntansi yang tepat, pengelolaan biaya, dan pentingnya pelaporan keuangan yang akurat. Dengan pemahaman yang lebih baik, pemilik proyek, manajer, dan pihak terlibat lainnya dapat lebih efektif dalam mengelola keuangan proyek konstruksi mereka. Pembahasan ini memiliki beberapa manfaat utama:

Meningkatkan Pengelolaan Keuangan: Dengan pemahaman tentang akuntansi konstruksi, pemilik proyek dan manajer dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya keuangan mereka. **Pertama, Mengurangi Risiko Keuangan:** Dengan sistem akuntansi yang tepat, risiko keuangan dalam

DAFTAR PUSTAKA

- Asas, A. M., Anna Marina, M. A., & Andrianto, S. M. (2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi terhadap minat mahasiswa perguruan tinggi di Surabaya prodi akuntansi untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi (PPAK) dan bekerja di ruang lingkup akuntansi.
- Horngrren, C. T., Sundem, G. L., Elliott, J. A., Philbrick, D. F., & Burgstahler, D. (2019). *Introduction to financial accounting*. Pearson.
- Liwoso, L. G., Setiono, S., & Sugiyarto, S. (2020). Identifikasi dan analisis risiko proyek pada masa konstruksi bangunan bertingkat 4-40 lantai di Jabotabek terhadap ruang lingkup, jadwal, dan sumber daya proyek.
- Maimunah, S. A., & Anggreni, D. U. (2018). Tinjauan pelaksanaan kewajiban perpajakan perusahaan jasa konstruksi dan kesesuaian dengan standar akuntansi kontrak konstruksi (PSAK tahun 2012) pada PT Imperial Media Panenmas.
- Rathore, H. S., & Sisodia, G. S. (2012). *Construction project accounting*. Excel Books India.
- Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan No. 08 Tentang Akuntansi konstruksi dalam pengerjaan, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 28 Oktober 2004.
- Talia, F., Lisnawanty, L., Anna, A., Irmayani, W. D., & Supriyatna, A. (2022). Sistem informasi pengelolaan kas kecil pada PT. Budi Bangun Konstruksi. *JAIS - Journal of Accounting Information System*.
- Yuwono, A. B., Yulinartati, Y., & Afroh, I. K. (2020). Konstruksi laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah (SAK EMKM).



AKUNTANSI PEMERINTAHAN

BAB 13: AKUNTANSI KEWAJIBAN

Dr. Darwanis, S.E., M.Si., Ak

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala

BAB 13

AKUNTANSI KEWAJIBAN

A. PENDAHULUAN

Organisasi berdasarkan tujuan terbagi dalam dua kategori yaitu, memiliki fokus atau motif untuk menghasilkan laba, dan tujuan tidak menghasilkan laba. Akuntansi bisnis dan akuntansi sektor publik adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan akuntansi masing-masing untuk organisasi yang menghasilkan laba dan nirlaba. Organisasi pemerintah merupakan salah satu Organisasi Sektor Publik.

Penyediaan laporan keuangan oleh organisasi pemerintah diamanatkan oleh aturan yang mengatur keuangan negara sebagai alat pertanggungjawaban penyelenggara negara untuk melaksanakan anggaran dan menggunakan sumber daya dalam kerangka waktu yang telah ditentukan. Laporan keuangan sering digunakan untuk menganalisis kondisi keuangan, menilai kemandirian dan efisiensi organisasi pelapor, dan membandingkan pendapatan aktual, pengeluaran, transfer, dan pembiayaan dengan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya dan membantu kepatuhan hukum dan peraturan. Akun keuangan entitas pelapor juga mencakup perincian antara lain ekuitas, kewajiban, dan aset. Tujuan dari pembuatan dan penyajian laporan keuangan ini adalah untuk memenuhi nilai-nilai akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan dana publik.

Kewajiban adalah hasil dari transaksi sebelumnya yang penyelesaiannya menyebabkan hilangnya sumber daya ekonomi. Kewajiban untuk membayar pinjaman dari lembaga keuangan dalam negeri, pinjaman dari organisasi internasional, pinjaman dari pemerintah

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2014). *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik: Dari Anggaran hingga Laporan Keuangan, Dari Pemerintah hingga Tempat Ibadah* (Edisi Kedu). Salemba Empat.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2015). *Buletin Teknis Nomor 22 tentang Akuntansi Utang Berbasis Akrual*. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. <https://www.ksap.org/sap/wp-content/uploads/2016/04/Bultek-22-Akuntansi-Utang-Akrual-Fin.pdf>
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 160/PMK.05/2017 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah* (pp. 1–152). Republik Indonesia. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2017/160~PMK.05~2017Per.pdf>
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.05/2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat* (pp. 1–213). Republik Indonesia. https://jdih.kemenkeu.go.id/download/fac4a6c4-61f4-4c8b-99b6-93b5b80512dd/22_PMK.05_2022Per.pdf
- Presiden Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah* (pp. 1–413). Republik Indonesia. <https://djpk.kemenkeu.go.id/attach/post-pp-no-71-tahun-2010-tentang-standar-akuntansi-pemerintahan/PP71.pdf>



AKUNTANSI PEMERINTAHAN

BAB 14: KOREKSI KESALAHAN PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PERUBAHAN LUAR BIASA

Mesak Yandri Masela, S.E., M.Ec.Dev

Universitas Lelemuku Saumlaki

BAB 14

KOREKSI KESALAHAN PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PERUBAHAN LUAR BIASA

A. PENDAHULUAN

Dalam dunia bisnis, perusahaan seringkali harus beradaptasi dengan perubahan dalam lingkungan bisnis, aturan perpajakan, dan peraturan akuntansi. Dalam proses ini, terkadang kesalahan perhitungan atau penyesuaian kebijakan akuntansi mungkin diperlukan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang koreksi kesalahan perubahan kebijakan akuntansi dan perubahan luar biasa sangat penting. Bagian pendahuluan ini akan membantu kita menjelajahi konsep ini dengan lebih baik dan memahami dampaknya terhadap pelaporan keuangan perusahaan.

Apabila ada perubahan kebijakan akuntansi dari periode sebelumnya maka kemungkinan akan mempengaruhi posisi keuangan secara material. Pengaruh yang material terhadap laporan keuangan tersebut harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Disamping itu, kemungkinan terjadi peristiwa luar biasa yang mempengaruhi kondisi kinerja keuangan suatu entitas secara signifikan. Dalam rangka full disclosure maka dalam laporan keuangan harus diungkapkan dampak peristiwa luar biasa tersebut terhadap kondisi kinerja keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ekarani, D., Pujiningsih, S., & Ahmad, A. (2022). Studi fenomenologi: akuntansi dan perubahan sekolah menjadi Badan Layanan Umum (BLU). *Jurnal Akuntansi Aktual*.
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2018). *Accounting Principles* (13th ed.). Wiley.
- Nobes, C., & Parker, R. (2016). *Comparative International Accounting* (13th ed.). Pearson.
- Rahayu, D. K., Rahmawati, I. D., & Prasajo, B. H. (2021). Dampak Perubahan PSAK Terhadap Kompetensi Dosen dan Tingkat Pemahaman Mahasiswa di Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
- Sarimawi, T., Asmawati, A., & Zulfiana, Z. (2020). ANALISIS PENGAKUAN PENDAPATAN BERDASARKAN PSAK NO. 23 PADA PDAM TIRTA SEGAH.
- Scott, W. R. (2015). *Financial Accounting Theory* (7th ed.). Pearson.
- Siregar, R. A. (2020). AKUNTANSI PENDAPATAN (PSAK No. 23) PADA PT. PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) MEDAN.
- Siddiq, F. R., & Suseno, A. E. (2019). FRAUD PENTAGON THEORY DALAM FINANCIAL STATEMENT FRAUD PADA PERUSAHAAN TERDAFTAR di JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) PERIODE 2014-2017 (Perspektif F-Score Model). *JURNAL NUSANTARA APLIKASI MANAJEMEN BISNIS*.
- Weygandt, J. J., Kimmel, P. D., & Kieso, D. E. (2018). *Accounting Principles* (13th ed.). Wiley.
- Wulanditya, P. (2022). KAJIAN EMPIRIS FINANCIAL RESTATEMENTS AKIBAT PERUBAHAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN DI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan (JIAKu)*.



AKUNTANSI PEMERINTAHAN

BAB 15: LAPORAN OPERASIONAL

Novi Rosyanti, S.E., M.Ak

Sekolah Vokasi IPB

BAB 15

LAPORAN OPERASIONAL

A. PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang berbasis akrual, mengatur bahwa pendapatan diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau adanya aliran masuk sumber daya ekonomi dalam instansi sedangkan beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi asset atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi suatu asset.

Informasi yang berkaitan dengan Pendapatan akrual dan beban akan disajikan dalam laporan keuangan pemerintahan yaitu laporan operasional. Laporan operasional pun menyajikan Surplus/Defisit operasional dalam suatu entitas pelaporan.

Pengguna laporan membutuhkan laporan operasional untuk melakukan evaluasi yang berkaitan dengan pendapatan akrual (Pendapatan LO) dan juga beban dalam kehidupan sehari-hari suatu entitas pelaporan, oleh karena itu, laporan operasional menyajikan informasi yang berkaitan:

1. Besarnya beban yang ditanggung pemerintah untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat
2. Mengenai kegiatan operasional pemerintahan secara menyeluruh untuk mengevaluasi kinerja pemerintah yang berkaitan dengan Efisiensi, efektifitas dan ekonomis serta untuk memberikan informasi mengenai pemakaian sumber daya ekonomi entitas

DAFTAR PUSTAKA

- Jakarta. Kementerian Keuangan. (2022). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 22/PMK.05/2022. Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat
- Jakarta. Komite Standar Akuntansi Pemerintah. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Jakarta. Kementerian Keuangan. (2022). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 212/PMK.05/2019. Jurnal Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Pusat
- Saputra, Dian. (2018). Analisis Penerapan Akuntansi Pada Usaha Toko Pakaian di Pasar Bawah-Pekanbaru. Jurnal Valuta, (4)2, 96-115
- Pati. Bupati Pati. (2016). Peraturan Bupati Pati Nomor 76 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah



AKUNTANSI PEMERINTAHAN

BAB 16: METODOLOGI PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Dr. Mohamad Djasuli, S.E., M.Si., QIA., CRA., CTT., CPTT

Universitas Trunojoyo Madura

BAB 16

METODOLOGI PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

A. PENDAHULUAN

Ketika diresmikannya Undang-Undang tentang Otonomi Daerah paska reformasi tahun 1997, pemerintah daerah diwajibkan untuk melaksanakan roda pemerintahan yang efektif dan efisien dan mampu memberikan hasil (kinerja) yang baik dalam hal tingkat kemajuan ekonomi, kualitas sumber daya manusia, dan pengendalian kekayaan sumber daya alam. Kewajiban tersebut dapat menjadikan masyarakat lebih makmur dan indeks pembangunan manusia meningkat. (Novitasari & Hapitri, 2019)

Istilah “pengukuran kinerja” diartikan sebagai mengukur keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian aktivitas suatu organisasi. Pengukuran ini dicatat dan diukur pada masukan (input) dan pengeluaran (output) dari program tersebut. Pengukuran kinerja sangat penting dilakukan karena sebagai alat ukur dalam hal meningkatkan kinerja salah satunya kinerja keuangan pemerintah daerah pada periode selanjutnya. Kinerja keuangan didefinisikan sebagai pengukuran suatu kinerja berdasarkan perhitungan menggunakan parameter keuangan. Pengukuran kinerja keuangan sangat penting dengan tujuan membantu pemerintah daerah mengambil keputusan secara tepat dan objektif, menilai pencapaian kinerja, serta evaluasi pelaksanaan suatu program agar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di Indonesia pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah, diatur dalam beberapa perundang-undangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Andirfa, M. (2018). *Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. Sulawesi: Unimal Press.
- Fahmi, I. (2016). *Pengantar Manajemen Sumber Daya Manusia Konsep Dalam Kinerja*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Halim, A. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. (2010). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Juliawati., d. (2012). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 15-29.
- Mahmudi. (2005). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Mahsun. (2016). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta.
- Mahsun, M. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta.
- Mahsun, M. (2017). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: CV Andi.
- Martono, & Agus, H. (2011). *Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: EKOINSIA.
- Novitasari, Y., & Hapitri, D. (2019). Realisasi Belanja Pemerintah Sektor Kesehatan dan Pendidikan, serta Pengaruhnya Terhadap IPM Kabupaten/Kota di Jawa Barat. *Cakrawala*, 2(1), 1-15.
- Patarai, M. I. (2017). *Kinerja Keuangan Daerah*. Makassar: De La Macca.

- Sawir, A. (2001). *Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan Perusahaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sularso, H., & Yanuar, R. E. (2011). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. *Media Riset Akuntansi*, 1-16.
- Sumual, C. D. (2017). Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kota Tomohon. 782-791.
- Syamsi, I. (1986). *Pokok-Pokok Kebijaksanaan, Perencanaan, Pemograman dan Penganggaran Pembangunan Tingkat Nasional dan Regional*. Jakarta: CV Rajawali.

Peraturan-Peraturan terkait:

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam ketentuan umum menyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan daerah
- Pemerintah Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis pengelolaan, pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

PROFIL PENULIS

Ir. Hartoto, M.Si



Penulis adalah Lektor bidang spesialisasi Akuntansi Sektor Publik pada Jurusan Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Miftahul Ulum Tanjungpinang. Pemerhati masalah kemiskinan, pelayanan publik, termasuk pembangunan ekonomi wilayah. Sejak lulus sarjana ekonomi Pertanian pada Unuversitas Lampung tahun 1990. Pada tahun 2003, mengambil program magister ilmu ekonomi pada Universitas Mulawarman dan ditempuh sekitar 20 bulan. Banyak kursus maupun pelatihan yang pernah diikuti, seperti TOT Pendamping PKH, TOT Pendamping KUBE, TOT UMKM dan Koperasi, TOT Kader Bangsa, TOT Pemberdayaan masyarakat, TOT pendidikan anti korupsi, TOT pengiat anti narkoba, dan lain sebagainya. Hartoto sering terlibat dalam kegiatan jasa konsultasi pada banyak lembaga dan kementerian baik yang dibiayai melalui APBN, APBD, maupun bantuan luar negeri. Jasa konsultasinya beragam dari pemberdayaan Koperasi UMKM, Pertanian/pedesaan, pelayanan publik, kredit perbankan, studi kelayakan, dan proyek implementasi yang meliputi hampir seluruh Provinsi di Indonesia.

Dani Sugiri, S.E., S.S.T., M.Ak.



Penulis menyelesaikan Program Studi Diploma III Keuangan Spesialisasi Kebendaharaan Negara di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada tahun 2005. Pendidikan Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi diperoleh dari Universitas Satya Negara Indonesia (USNI) pada tahun 2008. Penulis juga menempuh pendidikan Program Diploma IV Keuangan Spesialisasi Akuntansi Pemerintah pada STAN dan lulus pada tahun 2010. Jenjang magister diselesaikan pada tahun 2016 dari Universitas Indonesia pada Program Magister Akuntansi Pemerintahan dengan beasiswa STAR-SDP dari BPKP. Penulis berkarir sebagai PNS di Kementerian Keuangan yaitu Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) sejak tahun 2006. Penulis mengajar di STAN (sekarang Politeknik Keuangan Negara STAN) sejak tahun 2011 sebagai dosen tidak tetap. Sejak tahun 2019, penulis

menjadi pengajar tetap pada PKN STAN. Selain sebagai fungsional dosen, saat ini penulis juga menjalankan tugas sebagai Kepala Laboratorium pada Prodi DIV Manajemen Keuangan Negara. Mata kuliah yang diajar antara lain Pengantar Pengelolaan Keuangan Negara (PPKN) I dan II, Akuntansi Pemerintah Pusat, Akuntansi Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Desa, Perencanaan Anggaran, serta Transfer ke Daerah (TKD).

Dr. Rita Meutia, S.E., M.Si., Ak



Penulis lahir di Banda Aceh, 4 September 1971. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala (Aceh). Sarjana Ekonomi Akuntansi FEB (1994). Magister Ilmu Ekonomi Akuntansi Universitas Padjadjaran Bandung (1999). Program Doktor Ilmu Akuntansi Universitas Sumatera Utara (2019). Gelar Profesi Akuntan diperoleh dari Ikatan Akuntansi Indonesia (1994). Buku yang telah ditulis bersama : 1. Model Ekonomi Syariah; Fondasi Sistem Ekonomi (2020). 2. Menyongsong PTMT Pada Dunia Pendidikan (2021). 3. Adopsi Teknologi Metaverse dalam Pendidikan (2022). 4. Akuntansi Manajemen (2022). 5. Pembangunan Ekonomi Kreatif, Pendidikan dan Keteladanan (2022) 6. Kepabeanaan dan Beacukai (2023)

Sriyani, S.E., M. Akt



Penulis lahir di Yogyakarta, 8 Maret 1977, menyelesaikan pendidikan Diploma 3 Akuntansi di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada tahun 1998, menyelesaikan Strata 1 pada Jurusan Akuntansi lulus pada tahun 2003, dan menyelesaikan pendidikan Strata 2 pada Jurusan Akuntansi pada tahun 2010. Mengajar di STAN sejak tahun 2000 mengampu mata kuliah Pengantar Akuntansi, Akuntansi Biaya dan Akuntansi Pemerintah. Mengambil Jabatan Fungsional Dosen dan bergabung pada Politeknik Keuangan Negara STAN pada bulan November 2016 dan mengampu mata kuliah Akuntansi Pemerintah Pusat/Daerah, Penatausahaan Bendahara,

Akuntansi Biaya dan Pengantar Akuntansi. Aktif menjalankan Tri Darma Perguruan Tinggi dengan mengajar di PKN STAN, melakukan penelitian dengan menghasilkan publikasi ilmiah di bidang Akuntansi Pemerintah baik Pusat, Daerah, dan Desa. Menjalankan fungsi pengabdian kepada masyarakat dengan memberikan bimbingan teknik terkait keuangan daerah dan desa kepada para pelaku di daerah dan di desa termasuk membimbing KTTA dan Skripsi mahasiswa.

Riswan Ludfi, S.E., M.M



Penulis merupakan seorang Dosen dan peneliti pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banjarmasin. Menyelesaikan program Sarjana di Universitas Brawijaya Malang dan Magister Manajemen dengan konsentrasi keuangan di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Sebelum menjadi dosen, penulis yang memiliki hobi membaca, sempat bekerja di beberapa tempat seperti kantor pemasaran di Sidoarjo selulus dari S1, kantor Akuntan Publik dari tahun 2007-2014 sebagai auditor sekaligus bagian manajemen keuangan, menjadi konsultan manajemen mutu di salah satu perusahaan konsultan di Depok pada tahun 2014-2015, dan kini menjadi Dosen sekaligus peneliti di STIE Indonesia Banjarmasin dengan posisi di struktural sebagai sekretaris Badan Penjaminan Mutu sekaligus sebagai kepala Auditor Mutu Internal. Hingga kini masih aktif sebagai pengajar, peneliti dan penulis

Johanna M. Luhukay, S.P., M.Sc



Penulis lahir di Ambon 19 Januari 1974. Menyelesaikan pendidikan dasar hingga Menengah Umum di Kota Ambon, kemudian menyelesaikan studi S1 tahun 1997 pada Jurusan Budidaya Pertanian, Program Studi Sosial Ekonomi di Universitas Pattimura. Pada Tahun 2010 berhasil menyelesaikan studi S2 - Ekonomi Pertanian pada Universitas Gadjah Mada. Pada tahun 2016 mendapat Piagam Penghargaan sebagai Salah Satu Perempuan Pembawa Perubahan di Maluku oleh Clerry Institute Cleffy

Psychology & Humanity. Saat ini merupakan salah satu staf pengajar pada Program Studi Agribisnis, Jurusan Sosial Ekonomi, Fakultas Pertanian di Universitas Pattimura Ambon.

Agustina Mulyani, S.E., M.M



Penulis adalah salah satu dosen dan peneliti di bidang Manajemen, pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Dahani Dahanai Buntok. Tahun 2007 dipercaya untuk menjadi asisten dosen di kampusnya. Kecintaan pada dunia pendidikan diturunkan dari ayahnda penulis yang berprofesi seorang guru Matematika. Penulis juga telah menikah dan pasangan penulis juga merupakan seorang guru Bahasa Inggris. Dikelilingi orang-orang hebat di dunia pendidikan, membuat penulis semakin termotivasi dalam dunia pendidikan dan dalam bidang penelitian serta kepenulisan. Tina begitu dia disapa, mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi diperoleh dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Dahani Dahanai Buntok angkatan ke-III Tahun 2010. Kemudian pada tahun 2019 berhasil memperoleh gelar Magister Manajemen, pada Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari (UNISKA) Banjarmasin. Mata kuliah yang pernah dan saat ini penulis mengajar pada mata kuliah Pengantar Akuntansi 1, Pengantar Akuntansi 2, Akuntansi Biaya, Manajemen Investasi, Komunikasi Bisnis dan Perpajakan Manajemen. Buku yang telah dihasilkan penulis adalah :

1. Buku puisi solo dengan judul “Mencari Jati Diri”
2. Buku Antologi Cerpen (karya bersama) dengan Judul “Mengukir Kisah Berjuta Makna”
3. Menulis *book chapter* (karya bersama) dengan judul “Manajemen Bisnis di Era Pandemi Covid-19”
4. Menulis *book chapter* (karya bersama) dengan judul “Manajemen Sumber Daya Manusia”
5. Menulis *book chapter* (karya bersama) dengan judul “Komunikasi Bisnis”
6. Menulis *book chapter* (karya bersama) dengan judul “Manajemen Keuangan Perusahaan”

7. Menuis *book chapter* (karya bersama) dengan judul “Akuntansi Manajemen”
8. Menulis buku solo dengan judul “Peningkatan Kinerja SUMBER DAYA MANUSIA Berbasis Motivasi Dan Kompetensi”
9. Menulis *book chapter* (karya bersama) dengan judul “Pelatihan dan Pengembangan SDM”

Wia Rizqi Amalia, S.E., M.Sc



Penulis lahir di Banjarmasin, 27 Juni 1994. Bekerja dan berdomisili di kota yang sama, Kota Banjarmasin. Penulis memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dari program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat tahun 2015, dan *Master of Science in Accounting* (M.Sc) dari Program Magister Sains Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada pada tahun 2018. Saat ini bekerja sebagai Dosen pada program studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Indonesia Banjarmasin. Penulis juga berpengalaman dalam mengajar pada perguruan tinggi lain, yaitu Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Nasional Banjarmasin, dan Universitas Terbuka. Minat riset dan keilmuan yang dimiliki antara lain Perpajakan, Akuntansi Syariah, Sistem Informasi Akuntansi, dan Akuntansi Sektor Publik. Selain menjadi Dosen juga berprofesi sebagai ibu rumah tangga yang memiliki ketertarikan dalam diskusi dan mempelajari hal-hal baru. Penulis dapat dihubungi melalui email wia@stiei-kayutangi-bjm.ac.id.

Hans Victor Sitepu, S.E., M.M., CMA., CACP., CRMP



Penulis lahir di Jakarta tanggal 14 November 1981, menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S-1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia pada Agustus 2005, dan Strata Dua (S-2) di Magister Manajemen – Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat pada September 2018. Memperoleh gelar Certified Management

Accountant (CMA) dan Certification in Audit Committee Practices (CACP) di tahun 2023. Berkarir di bidang Akuntansi dan Auditing selama lebih dari 18 tahun sejak tahun 2005, penulis telah bekerja di berbagai jenis Perusahaan yang bergerak di berbagai sektor industry, mulai dari perkebunan, pertambangan, perdagangan kimia dan energi, serta distributor alat berat, hingga kemudian ditunjuk sebagai Komite Audit PT Pelabuhan Tanjung Priok sejak tahun 2022 hingga saat ini. Penulis juga aktif berkarya sebagai Konsultan ISO serta Manajemen Biaya bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Tahun 2022 hingga saat ini penulis diminta untuk menjadi Dosen Tetap di Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi GICI. Selain mengajar, penulis juga aktif melakukan penelitian di Bidang Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan, Sistem Informasi Akuntansi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Penulis memiliki beberapa artikel ilmiah yang terpublikasi pada jurnal nasional dan internasional terakreditasi.

Ribka Shintia Febriarti Bonara, S.E., M.Ak



Penulis lahir di Ambon tanggal 22 Februari 1989, menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S-1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga pada Januari 2011, dan Strata Dua (S-2) di Magister Akuntansi – Program Pascasarjana Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga pada Mei 2014. Sejak 2015 – 2023 bekerja sebagai Dosen Tidak Tetap di Program Studi Ilmu Administrasi Niaga/Bisnis, Sekolah Tinggi Administrasi (STIA) Trinitas Ambon. Selanjutnya, tahun 2019 - 2021 bekerja sebagai Dosen Tetap Non PNS di Jurusan AKuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pattimura Ambon. Tahun 2022 hingga saat ini penulis merupakan dosen tetap di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pattimura. Selain mengajar, penulis juga aktif melakukan penelitian di Bidang Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Penulis memiliki beberapa artikel ilmiah yang terpublikasi pada jurnal nasional dan internasional terakreditasi.

Mela Nurdialy, S.E., M.Ak



Penulis adalah staf pengajar di Program Studi Akuntansi Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor (SV IPB). Selain menjadi dosen tetap di SV IPB, penulis juga pernah mengajar di Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM IPB), PPA BCA, Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), dan STEI Tazkia (sekarang menjadi Institut Agama Islam Tazkia).

Selama ini penulis mengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1 dan Akuntansi Keuangan Menengah 2, Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Pemerintah, Akuntansi Pajak, Perpajakan 1 dan Perpajakan 2 dan Pajak Internasional serta Analisa proses Bisnis. Penulis meraih gelar sarjana bidang Manajemen dari Universitas Katolik Parahyangan Bandung dan Magister Akuntansi dari Universitas Indonesia. Penulis juga aktif melakukan beberapa penelitian yang sebagian diantaranya dipresentasikan pada seminar internasional, ataupun digunakan sebagai salah satu dasar kebijakan SKPD salah satu Pemda. Saat ini penulis juga menjadi ketua Tax Center Sekolah Vokasi IPB.

Darmawanta Sembiring, S.E., M.M



Penulis lahir di Medan, 30 Desember 1984. Lulus S2 di Program Studi Magister Manajemen Universitas YAPIS Papua tahun 2019. Saat ini sebagai Pejabat Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran – Ahli Muda dan Tenaga Pengajar di Politeknik Penerbangan Jayapura pada Program Studi Manajemen Bandar Udara

Dr. Darwanis, S.E., M.Si., Ak



Penulis adalah staf pengajar di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Syiah Kuala, lahir di Banda Aceh 18 Juni 1970. Meraih gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Syiah Kuala pada tahun 1994, menyelesaikan studi S2 di Program Pascasarjana Magister Ilmu Ekonomi dan Akuntansi

Universitas Padjadjaran. Studi S3 pada Program Pascasarjana Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Padjadjaran diraih pada tahun 2005. Ketertarikan penulis terhadap Akuntansi Sektor Publik terutama Akuntansi Pemerintah sejak 1995 saat penulis mulai bekerja sebagai dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Syiah Kuala. Penulis sampai saat ini telah mengampu mata kuliah Akuntansi Sektor Publik, Manajemen Keuangan Pemerintah, dan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah, Auditing, Akuntansi Manajemen, Pemeriksaan Manajemen, Pemeriksaan Keuangan Negara, Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi. Email Penulis: darwanis.fe@usk.ac.id

Novi Rosyanti, S.E., M.Ak



Penulis lahir pada Tanggal 09 November 1986 di Garut, Jawa Barat. Berasal dari keluarga yang berbudaya Sunda. Pendidikan penulis berawal dari SMA di tahun 2003 di SMA Negeri 9 Bogor dengan lulusan dari jurusan IPS, kemudian di tahun 2005 penulis melanjutkan kuliah S1 di Universitas Pakuan Bogor dengan mengambil Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi. Selama menjalani kuliah sarjana, penulis aktif menjadi asisten dosen dalam beberapa mata kuliah. Selesai menjalani perkuliahan S1, penulis melanjutkan bekerja sebagai seorang Dosen di Sekolah Vokasi IPB tahun 2010 dengan program Studi Akuntansi. Di tahun 2011 penulis mendapatkan beasiswa dari pihak Sekolah Vokasi untuk melanjutkan kuliah S2 di Universitas Trisakti dengan mengambil Program Magister Akuntansi. Lulus kuliah S2 tahun 2014. Kemudian di Tahun 2021 penulis diangkat sebagai Pegawai Negeri Non PNS Institut Pertanian Bogor sebagai Dosen dengan Unit Kerja di Sekolah Vokasi Bogor Program Studi Akuntansi. Saat ini, penulis dalam proses kenaikan pangkat Asisten Ahli Program Studi Akuntansi Sekolah Vokasi IPB

Dr. Mohamad Djasuli, S.E., M.Si., QIA., CRA., CTT., CPTT



Penulis adalah Dosen Program Studi Akuntansi Universitas Trunojoyo Madura dan menjadi Konsultan dan Tenaga Ahli Perencanaan dan Keuangan Daerah serta Keuangan Desa. Tenaga Ahli Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2002 – 2013. Meraih gelar sarjana dari Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Darul Ulum Jombang pada tahun 1994 dan gelar magisternya dari Universitas Diponegoro, Semarang pada tahun 2004, serta Gelar Doktor dari Pendidikan Doktor Ilmu Akuntansi (PDIA), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya pada tahun 2023. Penulis pernah menjadi Ketua Satuan Pengawas Internal dan Ketua LPPM di Universitas Trunojoyo Madura, serta saat ini juga aktif sebagai Pengurus Forum Dosen Akuntansi Publik (FDAP), anggota Persatuan Auditor Internal Indonesia (PAII) dan ISEI Madura. Email: mdjasuli@gmail.com

Mesak Yandri Masela, S.E., M.Ec.Dev



Penulis lahir di Lorulun, Kabupaten Kepulauan Tanimbar kec. Wertamrian pada 30 Januari 1986, menyelesaikan Sarjana pada Universitas Gajayana Malang pada tahun 2009 pada Program Studi Ekonomi Pembangunan dan pada tahun 2011 menyelesaikan studi Magister ekonomika Pembangunan pada Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Karier pertama sebagai tenaga staf pada Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Maluku Tenggara Barat di tahun 2013-2014, kemudian menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kabupaten Maluku Tenggara Barat di tahun 2014-2015, di tahun 2016 bekerja pada salah satu Perusahaan swasta di Jakarta dan di tahun 2018 mulai menjadi Dosen pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Saumlaki, tahun 2020 menjadi ketua program Studi Ekonomi Pembangunan dan saat ini sebagai Dosen tetap pada Universitas Lelemuku Saumlaki yang berdiri tahun 2022.

AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Sebagaimana sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara terutama Pasal 32, dimana laporan realisasi anggaran pemerintah, baik melalui sumber pembiayaan APBN maupun APBD disusun dan disajikan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Akuntansi pemerintahan merupakan suatu proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasikan, peringkasan, penganalisaan, dan pelaporan transaksi keuangan dari suatu entitas untuk menyediakan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan bagi entitas yang dikelola dan dibiayai seluruhnya dari pembiayaan anggaran negara baik melalui APBN maupun APBD.

Dalam sistem global, basis akuntansi merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang telah disepakati dan diterapkan sehingga sangat menentukan atas kapan transaksi atau kejadian berpengaruh dan harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Basis akuntansi terutama terkait dengan pencatatan pendapatan dan biaya ada yang berbasis kas (cash basis) dan basis akrual (accrual basis). Laporan keuangan pemerintah minimal yang harus disajikan adalah: (a). Laporan posisi keuangan akhir periode, (b). Laporan perubahan ekuitas, (c). Laporan arus kas; dan (d). Catatan atas laporan keuangan. Sedangkan laporan keuangan yang disajikan secara lengkap meliputi: (1). Laporan posisi keuangan akhir periode; (2). Laporan laba-rugi; (3). Laporan perubahan ekuitas; (4). Laporan arus kas; (5). Catatan atas laporan keuangan; (6). Informasi komperatif mengenai periode terdekat; dan (7). Laporan posisi keuangan awal periode.



Penerbit

widina

www.penerbitwidina.com

ISBN 978-623-459-789-9



9 786234 597899